



PLANET
INDONESIA

Menjembatani Keuangan Masyarakat dan Konservasi

Pembelajaran dari Badan Tata Kelola Masyarakat
di Kalimantan Barat, Indonesia

Penulis

Audrey Straw, Paul Thung, Putri Damatashia, Novia Sagita, Muflihati, Siti Kartikawati, Adam Miller

Tentang



Planet Indonesia (PI) menangani tragedi kepemilikan bersama (tragedy of the commons) di ekosistem tropis. Model holistik berbasis hak yang mereka terapkan mendukung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui penguatan hak atas wilayah, tata kelola yang inklusif, pengelolaan ekosistem, serta peningkatan ketahanan finansial. PI bekerja melalui kemitraan jangka panjang dengan kelompok masyarakat dan memprioritaskan perluasan dampak dengan mendukung organisasi masyarakat sipil (CSO) yang berakar secara lokal. PI menyediakan pendanaan dan dukungan teknis kepada mitra di Indonesia, serta berupaya memperkuat jaringan masyarakat sipil yang tangguh dan berkembang.

Alamat:

Yayasan Planet Indonesia, Jalan Perdana No. 89D, Pontianak, West Kalimantan, 78121, Indonesia

www.planetindonesia.org

Copyediting & Design: projectmorro.com

Akronim

CGB	<i>Community Governance Body</i> (Badan Tata Kelola yang dipimpin Masyarakat)
FGD	<i>Focus Group Discussion</i> (Diskusi Kelompok Terfokus)
NPM	<i>Net Profit Margin</i> (Margin laba bersih)
PIA	<i>Participatory Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Partisipatif)
PSDA	Pengelolaan Sumber Daya Alam
PUMK	Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi
ToC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)
YPI	Yayasan Planet Indonesia

Daftar Isi

	Abstrak	5
01	Pendahuluan	6
02	Konteks dan Metodologi	12
	2.1 Model Inti YPI: Badan Tata Kelola yang dipimpin Masyarakat	13
	2.2 Model Inklusi Keuangan YPI	14
	2.3 Wilayah dan Mata Pencaharian Lokal	15
	2.4 Pengumpulan Data	16
	2.5 Analisis Data	16
03	Hasil	18
	3.1 Capaian Keuangan PUMK	19
	3.2 Hasil Penilaian Dampak Partisipatif (PIA)	22
04	Wawasan	24
	4.1 Efek Tata Kelola: Peningkatan partisipasi dalam tata kelola dapat memperkuat dampak sosial dan lingkungan	25
	4.2 Efek Siklus Utang: Terdapat hubungan antara peningkatan mata pencaharian dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik	26
	4.3 Efek Modal Manusia: Kesehatan dan pendidikan berperan sebagai penghubung antara inklusi keuangan dan konservasi	27
	4.4 Efek Itikad Baik: Akses ke layanan keuangan dapat memperkuat persepsi positif dan kepercayaan	28
	Kesimpulan	30
	Daftar Pustaka	32

Abstrak

Organisasi pembangunan dan konservasi internasional kian lazim menggunakan inklusi keuangan untuk meningkatkan kondisi sosio-ekonomi sekaligus mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Meski upaya global memperkuat penghidupan masyarakat pedesaan terus berkembang, studi spesifik membedah keterkaitan antara aktivitas inklusi keuangan dan dampak lingkungan masih minim.

Penelitian ini menerapkan Teori Perubahan (*Theory of Change/ToC*) yang memetakan empat jalur pengaruh strategis: Efek Tata Kelola (*Governance Effect*), Efek Siklus Utang (*Debt Cycle Effect*), Efek Modal Manusia (*Human Capital Effect*), dan Efek Itikad Baik (*Goodwill Effect*). Keempat jalur ini menjadi kerangka analisis membedah hubungan tersebut dalam pendekatan Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi (PUMK) yang diinisiasi oleh organisasi lingkungan non-pemerintah, Yayasan Planet Indonesia (YPI) di Kalimantan Barat, Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi data laporan bulanan dari berbagai Layanan Keuangan yang bernaung di bawah 39 Badan Tata Kelola yang dipimpin Masyarakat (*Community Governance Bodies/CGB*), serta data dari Penilaian Dampak Partisipatif (*Participatory Impact Assessment/PIA*). Data PIA dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan 476 peserta. Hasil PIA mengungkapkan 72% kelompok diskusi menekankan capaian ketahanan finansial dan pengelolaan lingkungan merupakan hasil yang saling terkait erat dalam aktivitas inklusi keuangan. Studi ini menyimpulkan hubungan antara aktivitas inklusi keuangan dan hasil lingkungan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diidentifikasi melalui keempat jalur tersebut. Temuan-temuan ini memiliki relevansi bagi para praktisi secara global karena kami menyajikan bukti konkret bagaimana layanan keuangan PUMK dapat memajukan capaian lintas sektoral sekaligus memajukan partisipasi dalam tata kelola lingkungan.



— Nelayan tradisional sedang menyiapkan perahu. Foto: Planet Indonesia

BAB 1

Pendahuluan



— Perempuan dengan ambung kembali dari bertani di ladang. Foto: Planet Indonesia

Ekonomi dan konservasi kerap dipandang sebagai dua kutub yang saling bertentangan, terutama di wilayah terpencil yang ekstraksi sumber daya alam menjadi tumpuan utama masyarakat menopang ekonomi rumah tangga. Merespons tantangan tersebut, pemerintah dan organisasi non-pemerintah kian gencar mempromosikan program inklusi keuangan sebagai strategi meningkatkan penghidupan lokal sekaligus memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Terminologi inklusi keuangan yang mulai mengemuka pada dekade 2000-an kini telah menjadi prioritas strategis bagi organisasi pembangunan internasional dan semakin relevan dalam skema kerja konservasi (Sirtaine dan Gonzalez 2023; World Bank 2024; UNCDF 2017).

Banyak rumah tangga pedesaan, petani kecil, dan nelayan skala kecil masih menghadapi keterbatasan akses finansial serta beban utang yang tinggi (Hollar 2011; Mhlanga dkk. 2020; Mohammed dkk. 2018; Pomeroy dkk. 2020). Fenomena ini mengakibatkan rendahnya resiliensi sosio-ekonomi masyarakat dalam menghadapi fluktuasi harga pasar maupun guncangan lainnya (Li dkk. 2021; Mozumder dkk. 2024; Sirtaine dkk. 2023). Sebagai bagian dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, inklusi keuangan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan agar petani dan nelayan kecil dapat berintegrasi ke dalam pasar keuangan formal (Mhlanga dkk. 2020; Pomeroy dkk. 2020). Instrumen kebijakan yang ditempuh meliputi peningkatan literasi keuangan, mitigasi risiko pada lembaga keuangan, serta internalisasi budaya menabung (Pomeroy dkk. 2020; World Bank 2024; UNCDF 2017). Langkah ini krusial untuk mengikis ketimpangan peluang yang dialami masyarakat miskin dan kelompok

minoritas di pedesaan melalui pengurangan risiko serta ketidakpastian finansial (Mohammed et al. 2018; Pomeroy dkk. 2020; Thalut dkk. 2020; UNCDF 2017).

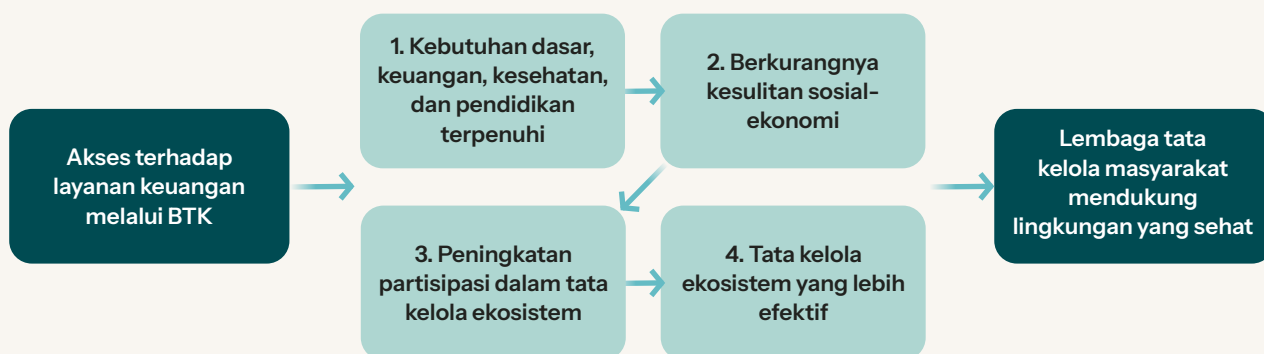
Keterkaitan antara inklusi keuangan dan konservasi merupakan bidang kajian yang baru berkembang, seiring meningkatnya pengakuan keduanya berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ozili 2023). Asumsinya, peningkatan inklusivitas terhadap lembaga keuangan dapat menstimulasi perilaku positif terhadap upaya konservasi. Saat ini, semakin banyak organisasi konservasi mengadopsi aktivitas inklusi keuangan, mengingat faktor sosio-ekonomi berdampak langsung pada kelestarian lingkungan (Wild dkk. 2021). Meski beberapa studi kasus menunjukkan inklusi keuangan mampu mentransformasi perilaku masyarakat ke arah positif bagi lingkungan (Hollar 2021; Thalut dkk. 2020), dampak tersebut tidak selalu seragam; misalnya di Tiongkok, dampak positif serupa tidak ditemukan (Li dkk. 2021). Kenyataan bahwa inklusi keuangan dapat berdampak positif namun bergantung pada variabel perantara yang kompleks memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana inklusi keuangan dapat menjadi bagian integral dari strategi konservasi?

Guna memahami hubungan tersebut lebih mendalam, kami memetakan keterkaitan keduanya melalui diagram Teori Perubahan berdasarkan upaya yang telah dijalankan oleh YPI.

Berdasarkan model inti YPI, diskusi dengan anggota staf kunci, serta tinjauan pustaka, kami mengidentifikasi empat jalur utama yang menghubungkan aktivitas keuangan dengan hasil lingkungan: **Efek Tata Kelola, Efek Siklus Utang, Efek Modal Manusia, dan Efek Itikad Baik.**

JALUR 1

Efek Tata Kelola



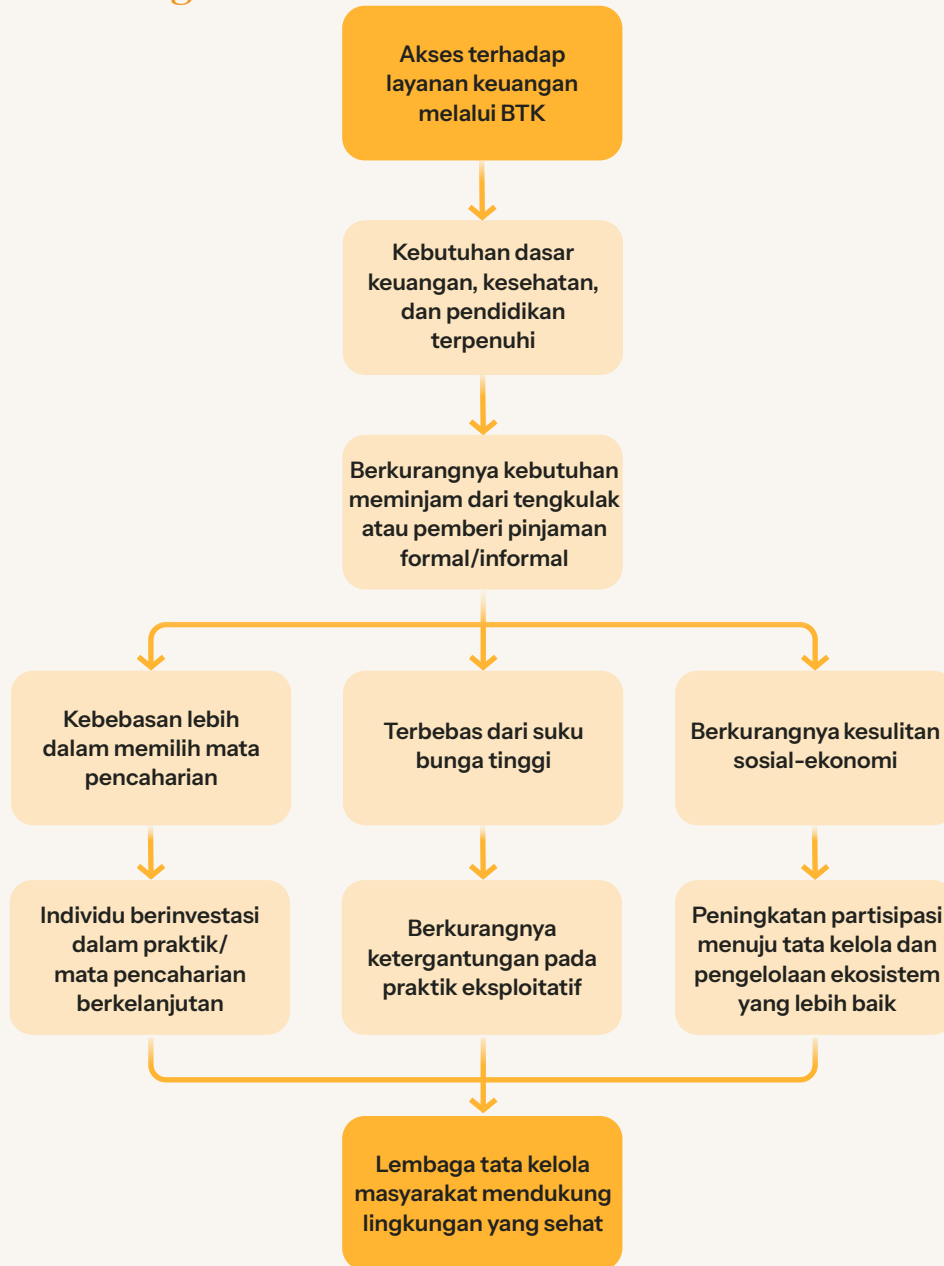
Gambar 1: Efek Tata Kelola. Sumber: Planet Indonesia

Efek Tata Kelola terjadi ketika aktivitas inklusi keuangan mengatasi hambatan sosio-ekonomi yang menghalangi partisipasi masyarakat dalam tata kelola ekosistem. Terbatasnya akses finansial sering kali menyebabkan masyarakat menarik diri dari pelibatan publik, misalnya karena hambatan

psikologis akibat beban utang tinggi (Armitage dkk. 2012; De Oliviera dkk. 2024; Segovia-Vargas dkk. 2023). Secara teoritis, jalur ini berasumsi inklusi keuangan dapat memulihkan kapasitas masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan ekosistem.

JALUR 2

Efek Siklus Utang



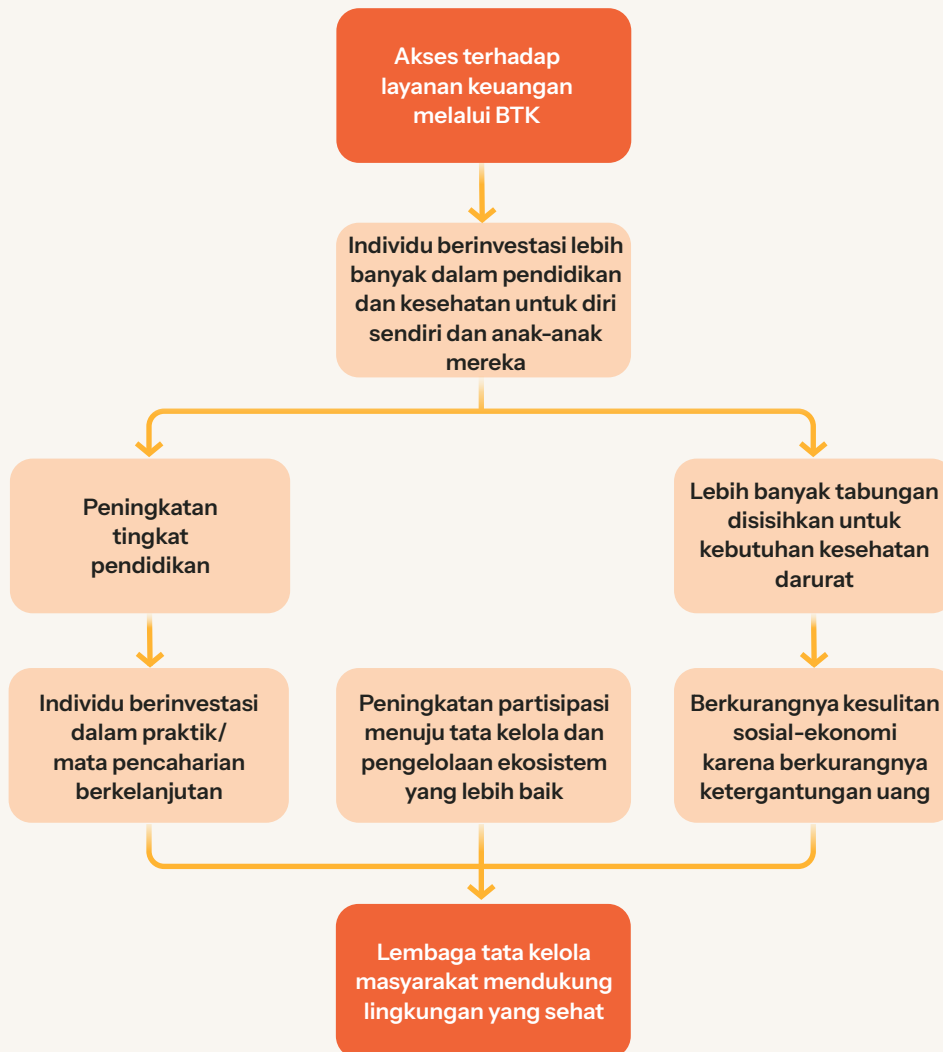
Gambar 2: Efek Siklus Utang. Sumber: Planet Indonesia

Efek Siklus Utang bekerja dengan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman berbunga tinggi (Pomeroy et al. 2020). Ketika rumah tangga terjebak dalam jeratan utang, mereka sering kali terpaksa melakukan praktik ekstraktif tidak berkelanjutan (Mozumder et al. 2024; Thalut et al. 2020). Inklusi keuangan

memberdayakan petani dan nelayan untuk berinvestasi pada mata pencaharian berkelanjutan (Segovia-Vargas dkk. 2023). Di Aceh, implementasi pinjaman berbunga 1% melalui koperasi terbukti mampu meningkatkan kesadaran konservasi serta mendukung praktik perikanan dan pertanian berkelanjutan (Novriyanto dkk. 2012).

JALUR 3

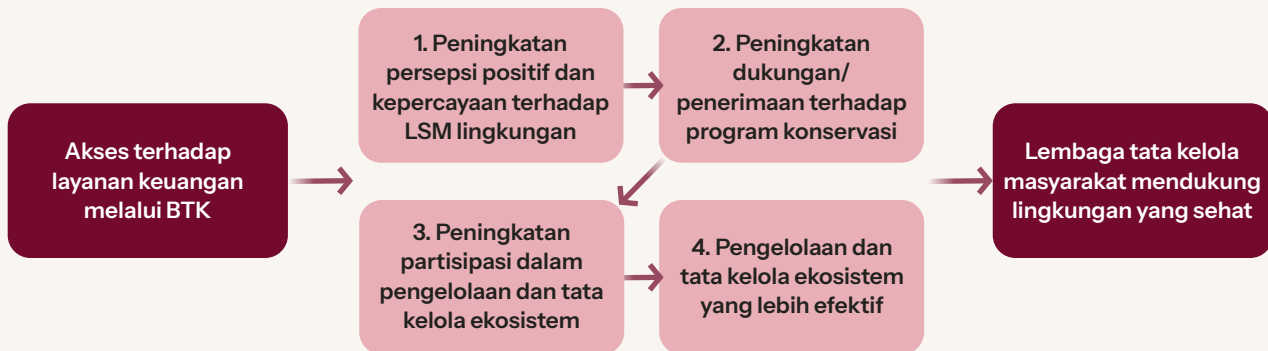
Efek Modal Manusia



Gambar 3: Efek Modal Manusia. Sumber: Planet Indonesia

Efek Modal Manusia muncul saat layanan keuangan memperbaiki capaian pendidikan dan kesehatan individu, yang pada gilirannya menstimulasi investasi dalam kehidupan berkelanjutan serta partisipasi dalam tata kelola ekologi. Keterbatasan akses terhadap pendanaan yang terjangkau merupakan hambatan utama bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan (Mohammed dkk. 2018; Pomeroy dkk. 2020; Segovia-Vargas dkk. 2023). **Karena itu, inklusi keuangan dapat meningkatkan literasi melalui**

perluasan akses finansial. Literasi yang lebih tinggi memudahkan individu untuk memperoleh dan memahami informasi mengenai konservasi (Bechtel 2010). Inklusi keuangan juga dapat memitigasi dampak dari kondisi darurat kesehatan (Banerjee dkk. 2022). Ketika kebutuhan kesehatan dan pendidikan terpenuhi, individu memiliki kapasitas lebih besar mempertimbangkan isu-isu seperti konservasi yang melampaui kebutuhan mendesak (Massingham dkk. 2023; Wang dkk. 2022).

JALUR 4**Efek Itikad Baik**

Gambar 4: Efek Itikad Baik. Sumber: Planet Indonesia

Efek Itikad Baik berpusat pada gagasan bahwa organisasi lingkungan non-pemerintah harus mengatasi resistensi atau ketidakpercayaan guna melibatkan masyarakat dalam proyek konservasi (Singleton dkk. 2019). Pemanfaatan jaringan sosial, pemberian kendali kepada masyarakat atas upaya konservasi, serta integrasi kesejahteraan masyarakat ke dalam program dapat membantu membangun kepercayaan terhadap organisasi lingkungan (Massingham dkk. 2023; Pomeroy dkk. 2020). Kepercayaan lebih besar mendorong peningkatan partisipasi dalam aktivitas masyarakat, termasuk pengelolaan ekosistem (Auer dkk. 2020). Sebuah studi mengenai nelayan

skala kecil di Sulawesi menemukan tingkat pendapatan lebih tinggi dan kepercayaan besar terhadap pemimpin masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan penutupan kawasan perikanan (*fishery closures*) serta aturan pengelolaan bersama lainnya (Kushardanto dkk. 2022). Karena itu, Efek Itikad Baik berhipotesis layanan keuangan yang mudah diakses akan meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan terhadap organisasi lingkungan.

Studi ini berfokus pada keempat jalur tersebut untuk mengevaluasi bagaimana program inklusi keuangan dapat berkontribusi terhadap capaian konservasi, baik di wilayah pesisir maupun daratan.

BAB 2

Konteks dan Metodologi



— Nelayan lokal dan pejabat pemerintah berangkat menuju pos patroli di Karimata.
Foto: Planet Indonesia

2.1 Model Inti YPI: Badan Tata Kelola yang dipimpin Masyarakat

YPI adalah organisasi lingkungan non-pemerintah yang berpusat di Pontianak, Kalimantan Barat. YPI berupaya melestarikan ekosistem yang terancam dengan memperkuat lembaga tata kelola berbasis masyarakat melalui model inti yang bertumpu pada empat pilar utama (**Gambar 5**). Pilar pertama, hak dan akses, memastikan masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola sumber daya alam (PSDA) secara efektif. Kedua, dukungan pengelolaan partisipatif, mencakup penyusunan tata guna lahan, pemetaan, rencana pengelolaan perikanan dan mangrove, serta patroli mandiri oleh masyarakat. Ketiga, tata kelola inklusif, mendukung dan mengembangkan BTK guna memfasilitasi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Keempat, mata pencaharian regeneratif, mengintegrasikan ketahanan finansial, layanan kesehatan, dan literasi untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi sekaligus meningkatkan resiliensi mata pencaharian masyarakat.

PUMK merupakan capaian utama model YPI yang membantu masyarakat menetapkan target sosio-ekonomi dan lingkungan dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal (Planet Indonesia 2022; Novick dkk. 2023). Sejak PUMK pertama dibentuk pada 2017, lebih dari 5.000 anggota di seluruh Kalimantan Barat telah berpartisipasi aktif hingga saat ini (Miller dkk. 2020). Pendekatan PUMK ini dikembangkan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama masyarakat dan terus berevolusi melalui keterlibatan aktif mereka (Planet Indonesia 2024).



Gambar 5: Model Inti YPI: Empat Pilar. Sumber: Planet Indonesia.

2.2 Model Inklusi Keuangan YPI

Melalui pilar keempat, YPI menerapkan pendekatan terintegrasi untuk mengatasi hambatan akses keuangan masyarakat. Selain itu, YPI juga menerapkan berbagai mekanisme perlindungan lingkungan (*environmental safeguards*) dalam layanan keuangan guna mencegah dampak negatif yang mungkin muncul dari layanan keuangan. Bahkan dalam ruang lingkup konservasi, model yang dijalankan ini relatif jarang diintegrasikan. Dalam pendekatan konvensional, peningkatan ketahanan finansial biasanya dihasilkan melalui peningkatan hasil panen, sedangkan PSDA sering kali dikembangkan secara terpisah. Sebaliknya, model inklusi keuangan ini berfokus pada tata kelola yang baik dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam PSDA. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang kerap memisahkan aspek ekonomi dan konservasi, kerangka kerja tersebut mengedepankan tata kelola yang kuat guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Hal ini memungkinkan integrasi layanan keuangan di PUMK, yang mencakup perjanjian pinjaman fleksibel, instrumen simpanan yang adaptif terhadap fluktuasi musiman, peningkatan literasi keuangan, serta penyelarasan dengan upaya pelestarian alam.

Model inklusi keuangan ini mendorong masyarakat untuk menerapkan pinjaman tanpa bunga dengan biaya administrasi tetap guna menutupi waktu yang dialokasikan oleh pengurus dalam mengelola kelompok tersebut. Sistem biaya tetap ini menjamin cicilan anggota tidak membengkak akibat bunga majemuk, namun tetap memastikan sistem memiliki dana operasional yang cukup untuk keberlanjutan mandiri. Strategi ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memutus Efek Siklus Utang yang kerap dipicu oleh suku bunga tinggi (Miller dkk. 2024a; Miller dkk. 2024b; Pomeroy dkk. 2020).

Dalam pelaksanaannya, masyarakat mengelola layanan keuangan melalui sub-kelompok kerja di bawah PUMK bernama kelompok kerja dana ketahanan. Layanan keuangan mulai dijalankan setelah lembaga PUMK terbentuk mapan dengan pengurus terpilih, aturan keanggotaan dan partisipasi yang jelas, serta sistem proteksi yang matang. Untuk menjamin akuntabilitas, pengurus mendapatkan pelatihan pembukuan, sementara anggota dapat mengikuti pelatihan pengelolaan anggaran rumah tangga.

PUMK menyediakan dua skema pinjaman: pinjaman individu dan pinjaman kelompok. Plafon pinjaman bergantung pada jumlah simpanan anggota, umumnya bernilai 3 hingga 5 kali lipat dari total simpanan. Untuk pinjaman kelompok, anggota menyusun proposal usaha bersama untuk mengajukan pinjaman dengan plafon yang umumnya lebih besar dari pinjaman individu. Skema ini memerlukan jaminan serta biaya administrasi yang sedikit lebih tinggi. Kedua skema tersebut menitikberatkan pada perolehan keuntungan bersih bagi anggota, bukan pada akumulasi bunga yang tinggi.

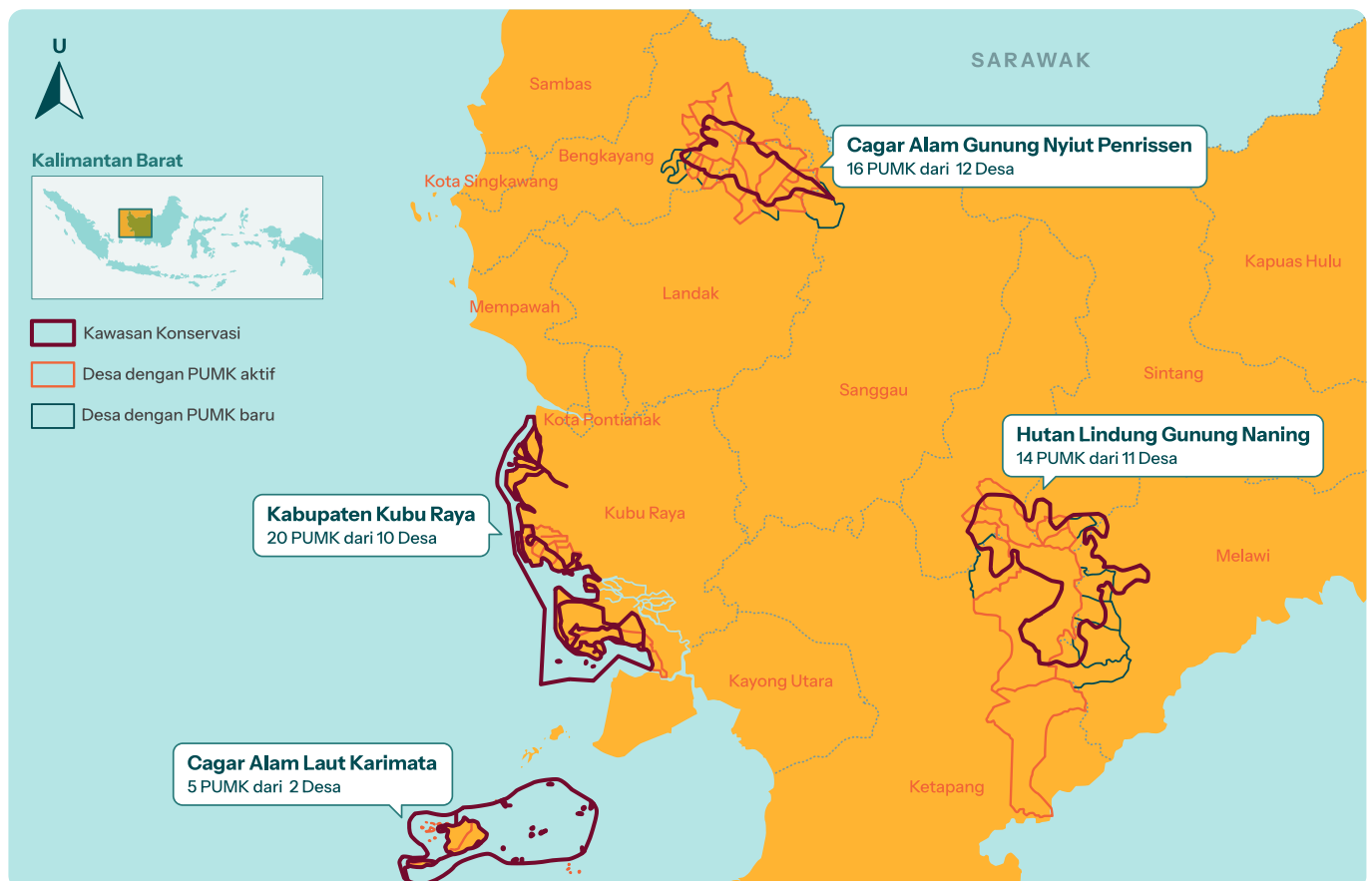
2.3 Wilayah dan Mata Pencaharian Lokal

Wilayah studi mencakup tiga bentang alam utama di enam kabupaten di Kalimantan Barat, lokasi pelaksanaan layanan keuangan PUMK: Kubu Raya (Kabupaten Kubu Raya), Gunung Naning (Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Ketapang), dan Gunung Nyuit (Kabupaten Bengkayang dan Landak). Lokasi-lokasi ini mencakup lebih dari 2,2 juta hektar (ha) lahan, baik di wilayah pesisir (Kubu Raya) maupun daratan (Gunung Naning dan Gunung Nyuit) (**Gambar 6**). Area ini bersinggungan dengan tempat tinggal dan lokasi mata pencaharian masyarakat, dengan sekitar 27.229 jiwa menetap di wilayah kerja YPI.

Kubu Raya: Memiliki dua hutan mangrove lindung, Hutan Lindung Seruat Pulau Tiga dan

Hutan Lindung Gunung Bongkok, seluas 35.509 ha. YPI bekerja sama dengan 7 desa di Kubu Raya, di mana 6 di antaranya telah memperoleh hak pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kebijakan Perhutanan Sosial. Mata pencaharian utama masyarakat meliputi perikanan dan perkebunan.

Gunung Naning merupakan hutan lindung seluas 229.000 ha yang terletak di empat kabupaten, dengan program aktif di tiga kabupaten. Kawasan ini terdiri dari hutan hujan dataran rendah, submontana, dan montana. Sebagian masyarakat sedang dalam proses pengajuan hak pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan Sosial. Tidak semua masyarakat di kawasan ini telah memiliki hak pengelolaan hutan resmi, namun saat ini terdapat beberapa proses pengajuan yang sedang berlangsung melalui skema Perhutanan Sosial.



Gambar 6: Peta desa dan kawasan lindung di wilayah kerja organisasi. Desa-desa yang disorot di Cagar Alam Laut Karimata tidak termasuk dalam studi ini. Sumber: Planet Indonesia.

Cagar Alam Gunung Nyiut meliputi 91.700 ha hutan hujan montana, submontana, dan dataran rendah yang secara formal dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Selain di dalam Cagar Alam, program juga beroperasi di bentang alam yang lebih luas termasuk Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Areal Penggunaan Lain (APL).

Pengumpulan Data

Data disusun dari berbagai sumber dan metode pengumpulan. Data keuangan diperoleh dari kelompok kerja di setiap PUMK dan merupakan ringkasan informasi yang diperbarui tim teknis setiap bulan. Data mencakup tiga aspek utama: simpanan, pinjaman individu, dan pinjaman kelompok. Data yang dilaporkan dari PUMK terkadang tidak lengkap. Informasi tambahan dikumpulkan melalui Penilaian Dampak Partisipatif (*Participatory Impact Assessments/PIA*) mengikuti metodologi yang dikembangkan Miller dkk. (2020) dan Novick dkk. (2023). Data PIA ini dikumpulkan dari lima kabupaten di Kalimantan Barat, setiap PUMK menyelenggarakan satu hingga tiga diskusi kelompok terfokus (FGD) tergantung ukuran lembaga tersebut dan kesediaan peserta berpartisipasi. Komposisi kelompok dalam diskusi tersebut terdiri dari kelompok khusus perempuan (13 FGD), khusus pengurus (11 FGD), atau kelompok campuran (14 FGD) dengan jumlah peserta 7 hingga 21 orang per kelompok. Secara keseluruhan, terdapat 38 FGD yang dilaksanakan dengan 476 peserta, durasi pertemuan berlangsung selama 3 hingga 4 jam dan FGD yang melibatkan khusus pengurus cenderung memakan waktu paling lama. Selain itu, staf YPI juga mengumpulkan informasi berdasarkan temuan lapangan melalui percakapan dengan anggota PUMK di lokasi Kubu Raya untuk memberikan konteks terhadap data kuantitatif. Seluruh identitas partisipan dan data yang disajikan dalam studi ini bersifat rahasia untuk menjaga privasi responden.

Analisis Data

Analisis statistik dan visualisasi data untuk kedua dataset dilakukan menggunakan R versi 4.3.2. Studi ini mengevaluasi pendekatan keuangan berbasis tata kelola lokal yang dijalankan PUMK dengan dukungan YPI melalui analisis data keuangan serta data PIA yang mencerminkan respons masyarakat terhadap program tersebut. Baik kegiatan PIA maupun pengumpulan data PUMK adalah bagian dari rencana pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (*Monitoring, Evaluation, and Learning/MEL*) organisasi.



38

FGD diselenggarakan

13

kelompok khusus perempuan

11

kelompok khusus pengurus

14

kelompok campuran

Dalam pengolahannya, pinjaman individu dan kelompok dipertimbangkan secara terpisah untuk memperoleh pemahaman mengenai perbedaan penggunaan pinjaman. Dalam banyak visualisasi, data yang tidak tersedia tidak disertakan. Variabel alasan pinjaman individu diringkas dari 16 menjadi 8 kategori. Variabel jenis pinjaman kelompok yang diambil diringkas dari 58 kategori menjadi 6 kategori. Rata-rata simpanan, ukuran pinjaman individu dan kelompok, serta jumlah anggota dalam suatu kelompok dihitung dengan mencari rata-rata dari setiap variabel di enam kabupaten pada 2023. Margin laba bersih atau *Net Profit Margin* (NPM) dihitung menggunakan rumus berikut:

$$(\text{Net Profit}/(\text{Loan Size} + \text{Net Profit})) * 100.$$

Dalam konteks ini, pendapatan dipahami sebagai jumlah total dari ukuran pinjaman yang diambil oleh unit usaha ditambah dengan laba bersihnya. NPM diinterpretasikan sebagai persentase dari total uang yang masuk yang kemudian menjadi penghasilan bagi unit usaha tersebut.

Artikel ini melihat secara khusus pada indikator aktivitas keuangan yang dikumpulkan oleh YPI. Anggota FGD diminta membuat daftar aktivitas yang komprehensif berdasarkan pengetahuan mereka tentang program, yang diringkas menjadi aktivitas yang lebih luas (Miller dkk. 2020; Thung dkk. *dalam persiapan*). Mereka kemudian mendiskusikan perubahan paling signifikan di masyarakat sejak implementasi PUMK dan membuat skor pengaruh berdasarkan pengaruh aktivitas mereka terhadap perubahan-perubahan tersebut. Skor pengaruh diperingkat pada skala Likert 0 hingga 3 (0 = tidak berpengaruh, 1 = pengaruh lemah, 2 = pengaruh sedang, dan 3 = pengaruh kuat; peringkat juga diberi tanda negatif jika cenderung negatif). Berdasarkan FGD, organisasi menggabungkan semua respons inklusi keuangan ke dalam 11 aktivitas yang dilakukan PUMK. Selain itu, 24 dampak berbeda diidentifikasi berdasarkan respons FGD sebagai hal yang telah dipengaruhi aktivitas tersebut. Untuk analisis ini, 24 dampak tersebut diringkas menjadi 7 dampak utama. Selanjutnya, rata-rata skor pengaruh untuk setiap dampak berdasarkan seluruh aktivitas dihitung untuk semua FGD dan di berbagai tipe FGD.



— Anggota masyarakat dari Dusun Tauk melihat hasil kamera jebak di stasiun penelitian Tagong. Foto: Planet Indonesia

BAB 3

Hasil



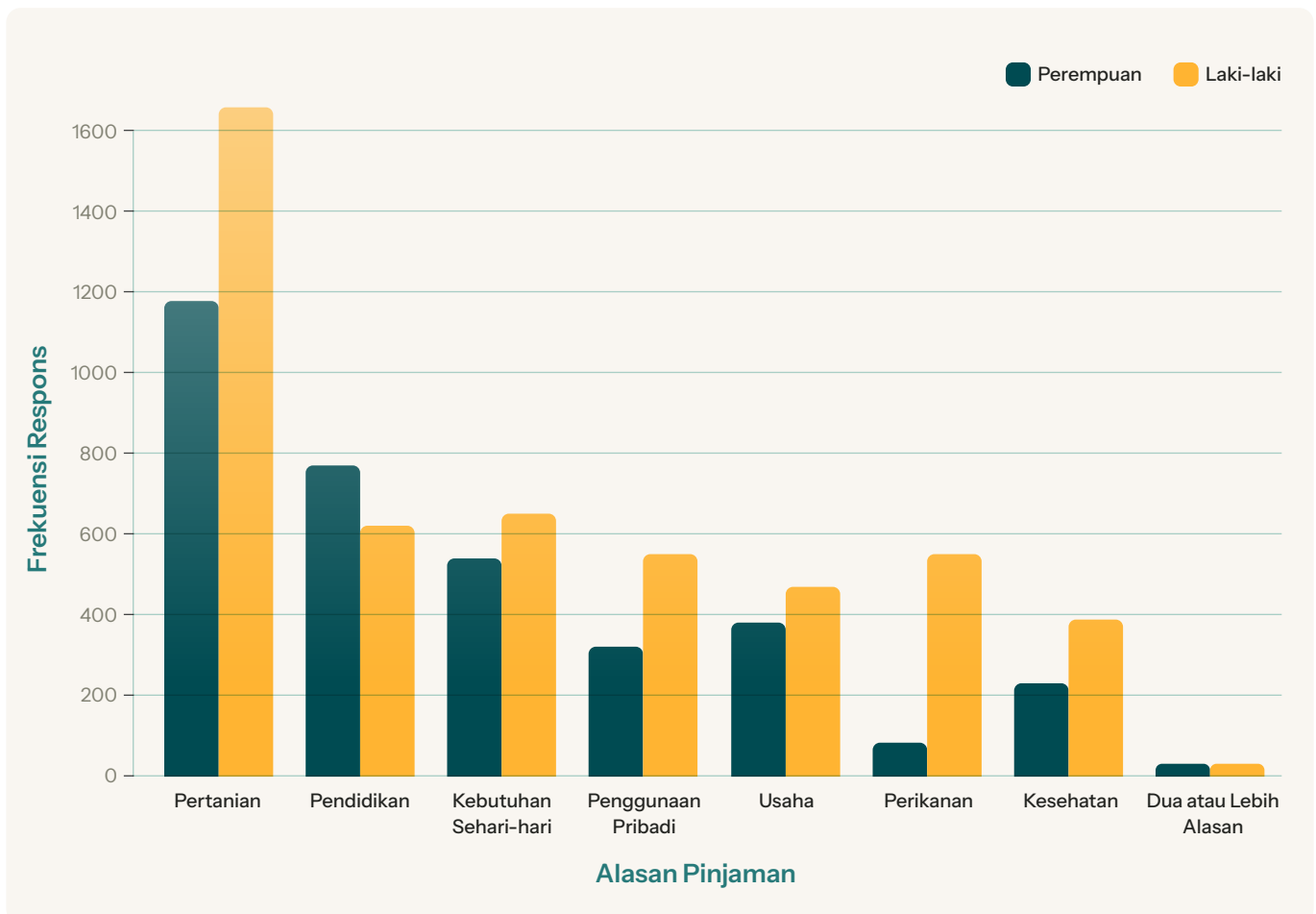
— Salah satu dari lebih dari 70 pulau kecil yang terdapat di dalam kawasan konservasi laut Karimata. Foto: Planet Indonesia



3.1 Capaian Keuangan PUMK

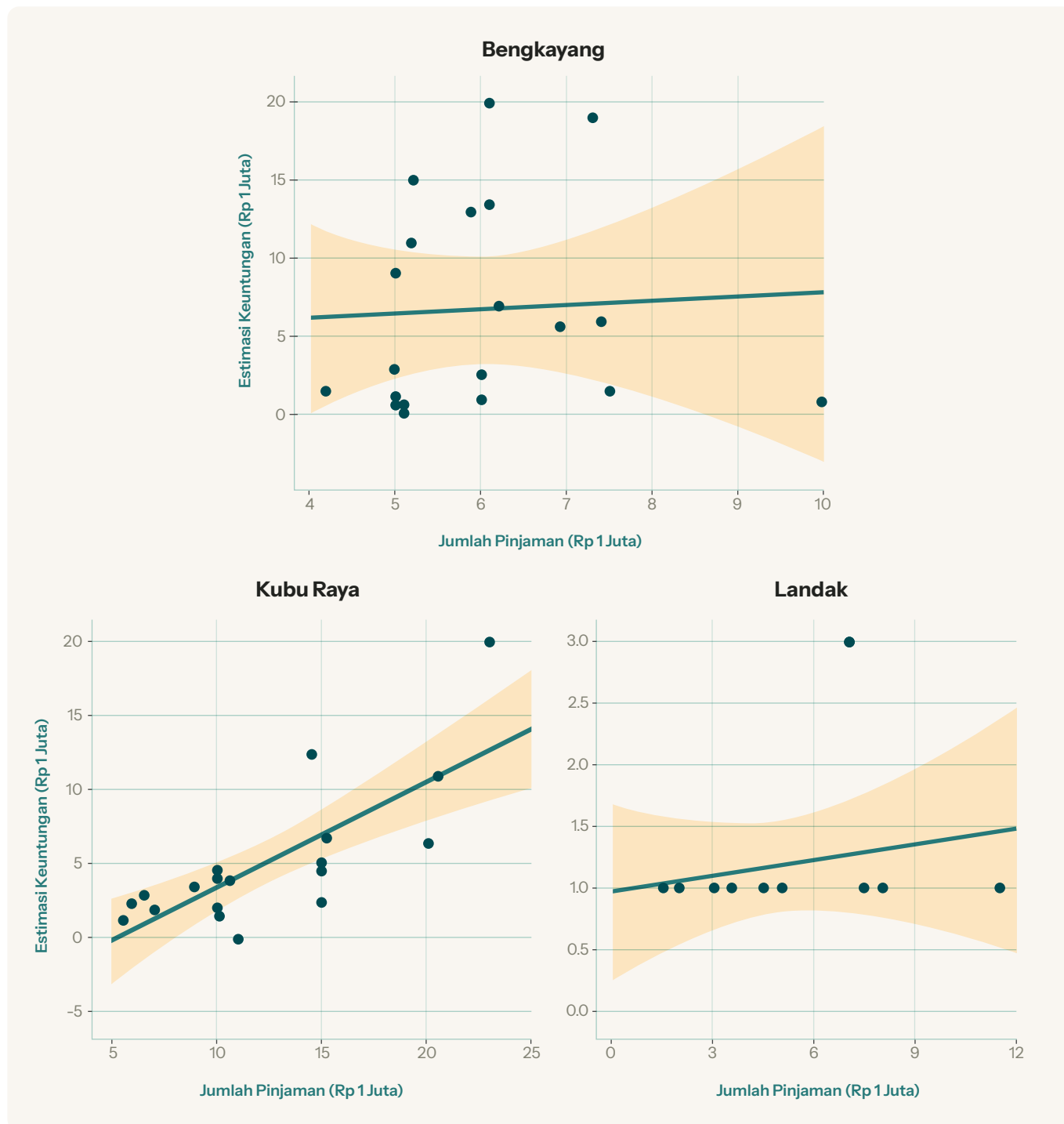
Program keuangan inklusif YPI telah diimplementasikan di tiga bentang alam utama yang mencakup enam kabupaten, dengan pelaksanaan di 37 PUMK. Pada tahun 2023, total simpanan di dalam PUMK berkisar Rp4.210.000 (US\$271,05) hingga Rp188.842.300 (US\$12.158,27).

Plafon pinjaman individu bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp30.000.000, dengan lebih dari 10.000 pinjaman telah disalurkan sejak 2018. Sekitar 41% pinjaman individu diakses perempuan (**Gambar 7**). Alasan paling umum pengajuan pinjaman adalah untuk sektor pertanian (34%), diikuti pendidikan (17%), dan kebutuhan sehari-hari (14%) (**Gambar 7**). Perempuan mengambil pinjaman untuk biaya pendidikan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sebagian besar mereka menggunakan dana tersebut untuk aktivitas yang memperkuat kehidupan seperti pertanian, perikanan, dan usaha.



Gambar 7: Alasan pengambilan pinjaman berdasarkan jumlah individu dari November 2018 hingga April 2024. Data terpilah gender dengan perempuan (hijau tua) dan laki-laki (kuning) yang mewakili distribusi frekuensi respons. Sumber: Planet Indonesia.

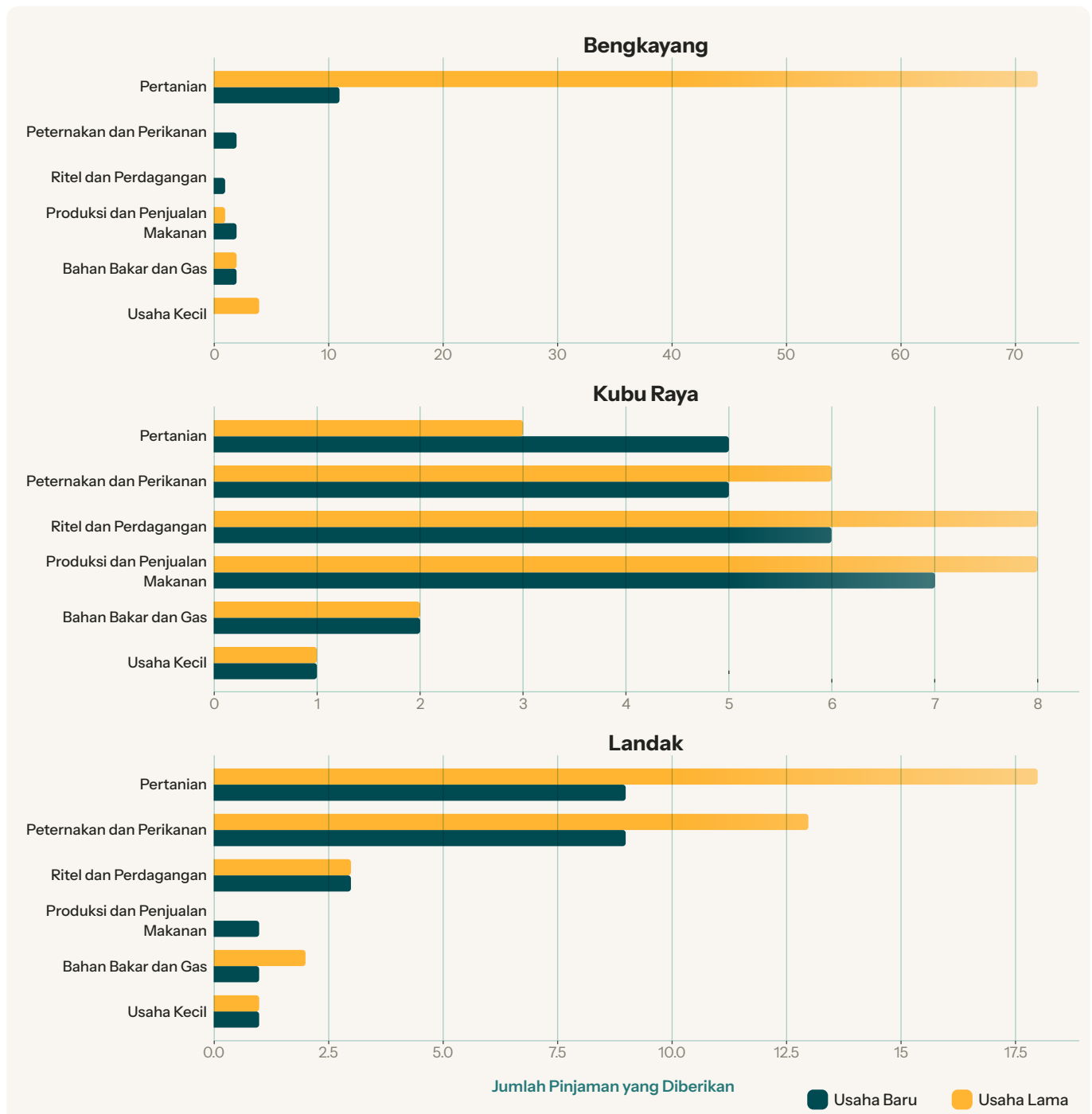
Skema pinjaman kelompok hanya diterapkan di tiga kabupaten: Bengkayang, Landak, dan Kubu Raya. Sejak 2021, lebih dari 250 pinjaman kelompok telah disalurkan dengan nilai mulai dari Rp1.000.000 hingga Rp35.000.000. Kubu Raya memiliki rentang nilai pinjaman lebih luas namun mencatatkan profil keuntungan serupa dengan Bengkayang (**Gambar 8**). Di Bengkayang, peminjam menghasilkan laba tertinggi, bahkan terdapat kasus di mana pinjaman sebesar Rp6 juta mampu menghasilkan estimasi laba hingga Rp20 juta (**Gambar 8**). Sebaliknya, laba di Landak cenderung rendah dan tidak pernah melampaui Rp5 juta. Meski demikian, Landak mencatatkan rata-rata NPM tertinggi sebesar 21%, diikuti Kubu Raya (20%) dan Bengkayang (16%), dengan rata-rata NPM keseluruhan sebesar 19%.



Gambar 8: Ukuran pinjaman yang diambil kelompok dibanding perkiraan laba dari Agustus 2021 hingga Januari 2024. Data dikelompokkan berdasarkan kabupaten. Pengamatan yang disajikan dalam gambar hanya mencakup pinjaman yang telah dilunasi (119 pinjaman); tidak ada perkiraan laba untuk pinjaman yang belum lunas (136 pinjaman). Sumber: Planet Indonesia.

Di ketiga kabupaten tersebut, mayoritas kelompok menggunakan pinjaman untuk mendukung unit usaha yang sudah berjalan (179 pinjaman) dibandingkan untuk investasi pada usaha baru (51 pinjaman).

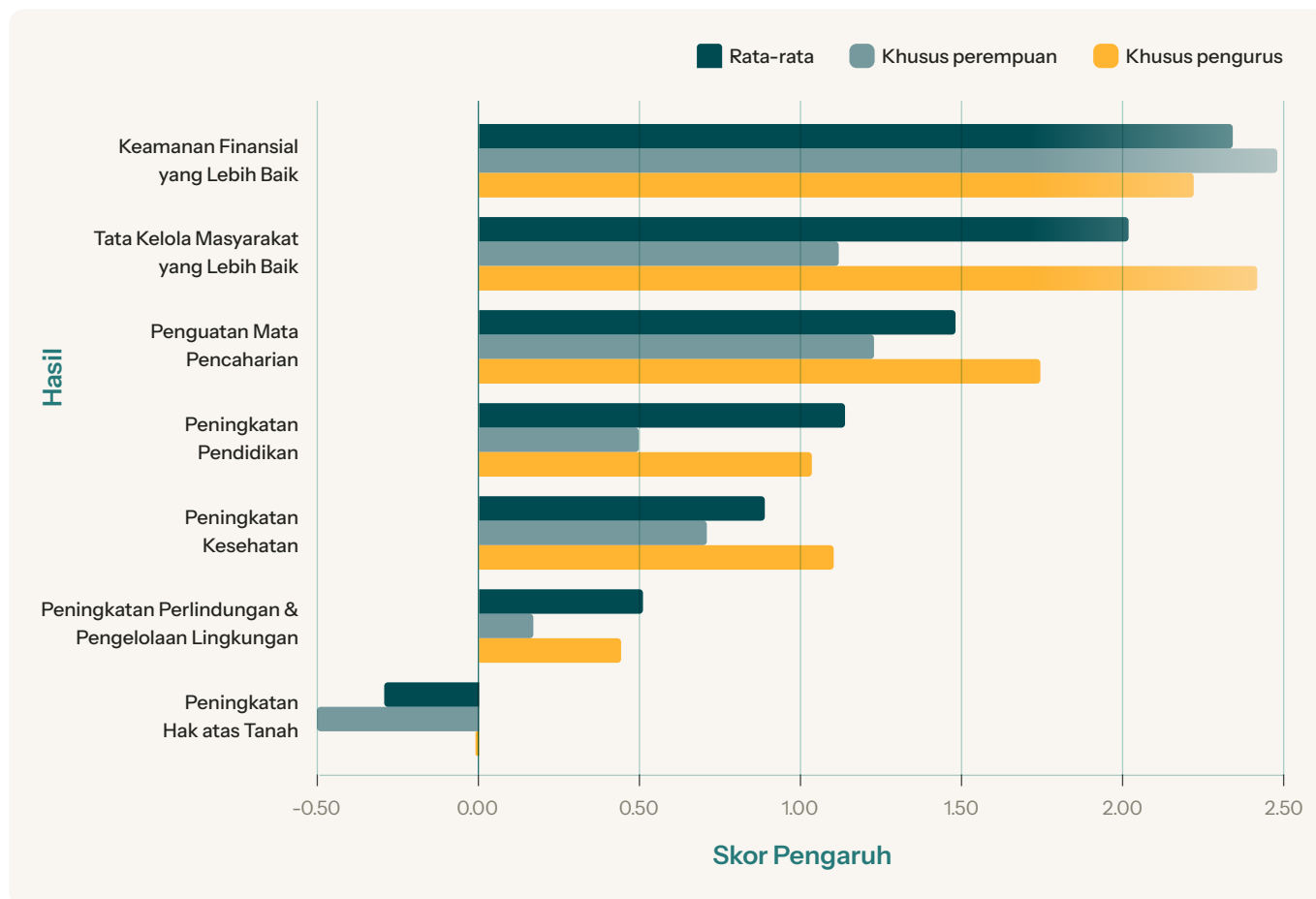
Sebagian besar pinjaman kelompok disalurkan di Bengkayang, yang didominasi oleh tujuan pertanian (**Gambar 9**). Pola serupa terlihat di Landak di mana sebagian besar pinjaman kelompok diarahkan untuk bisnis pertanian, meski terdapat investasi signifikan pada peternakan dan perikanan. Di Kubu Raya, sebagian besar pinjaman mendukung produksi pangan, penjualan, ritel, dan perdagangan (**Gambar 9**). Unikny, meski merupakan wilayah pesisir, jumlah pinjaman pertanian di Kubu Raya melampaui sektor peternakan dan perikanan.



Gambar 9: Jenis-jenis pinjaman usaha yang diambil kelompok PUMK. Hijau tua mewakili pinjaman yang diambil untuk memulai usaha baru dan kuning mewakili pinjaman untuk mendukung usaha yang sudah ada. Sumber: Planet Indonesia.

3.2 Hasil Penilaian Dampak Partisipatif (PIA)

Hasil FGD mengidentifikasi layanan keuangan PUMK rata-rata memberikan pengaruh positif terhadap seluruh indikator capaian, kecuali pada perbaikan hak atas tanah (**Gambar 10**). Indikator ketahanan finansial yang lebih baik, berada tepat di bawah skor tata kelola masyarakat yang lebih baik, mencatatkan skor pengaruh rata-rata tertinggi. Di luar isu hak atas tanah, indikator perbaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan memperoleh skor terendah. Secara komparatif, FGD yang hanya beranggotakan perempuan secara umum menilai bahwa aktivitas layanan keuangan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap berbagai capaian. Sebaliknya, FGD khusus pengurus cenderung memberikan skor pengaruh yang lebih tinggi pada hampir seluruh indikator. Hasil dari FGD campuran menunjukkan nilai yang paling mendekati rata-rata keseluruhan.



Gambar 10: Skor pengaruh dari dampak yang diidentifikasi dari beragam FGD melalui PIA yang dilakukan pada 2022. Skor pengaruh ini hanya didasarkan pada dampak layanan keuangan PUMK terhadap hasil tersebut. Sumber: Planet Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, seluruh kelompok kecuali satu menyebutkan peningkatan ketahanan finansial sebagai dampak dari layanan keuangan PUMK. Capaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta ketahanan finansial disebutkan secara bersamaan sebanyak 72% kali. Selain itu, hasil pengelolaan lingkungan serta kesehatan/layanan kesehatan disebutkan secara simultan oleh 61% kelompok diskusi.



— Pemandangan Pulau Betok, Karimata. Photo: Planet Indonesia

BAB 4

Wawasan



— Perempuan kembali dari menangkap ikan di Desa Betok Jaya, kawasan konservasi laut Karimata. Foto: Planet Indonesia

4.1 Efek Tata Kelola: Peningkatan partisipasi dalam tata kelola dapat memperkuat dampak sosial dan lingkungan

Efek Tata Kelola bertumpu pada tiga asumsi kunci: 1) aktivitas inklusi keuangan menstimulasi peningkatan partisipasi dalam tata kelola ekosistem, 2) peningkatan partisipasi tersebut memperbaiki kualitas tata kelola, dan 3) kualitas tata kelola yang lebih baik mendukung lingkungan sehat. Hasil PIA menunjukkan hubungan positif yang jelas antara aktivitas keuangan dengan persepsi dampaknya terhadap capaian tata kelola. Anggota masyarakat memiliki persepsi kuat bahwa inklusi keuangan berkontribusi pada tata kelola yang baik. Temuan ini memperkuat bukti bahwa keterbatasan sumber daya finansial di tingkat masyarakat dapat membatasi dampak pemerintah dalam implementasi kebijakan, seperti pengelolaan bakau (De Oliveria dkk. 2024); temuan ini menunjukkan tanpa layanan keuangan, kapasitas dan dampak PUMK menjadi terbatas.

FGD khusus perempuan menilai pengaruh aktivitas keuangan terhadap tata kelola sedikit lebih rendah, meski masih dalam kategori sedang, walau tingkat keterlibatan dalam PUMK bervariasi antar-desa. Perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan temuan Kushardanto dkk. (2022)—bahwa perempuan yang tidak dilibatkan dalam tata kelola cenderung kurang patuh terhadap regulasi pengelolaan lingkungan—juga berlaku dalam konteks ini.

Meski hasil PIA tidak secara langsung menunjukkan hubungan peningkatan inklusi keuangan dengan peningkatan aktivitas tata kelola lingkungan, penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang hubungan ini. Novick dkk. (2023), yang mengevaluasi intervensi serupa di bentang alam identik, menunjukkan korelasi negatif signifikan secara statistik antara partisipasi program, aset kelompok, tingkat panen petani, dan keterlibatan agroforestri dengan penurunan angka perburuan liar, pembalakan liar, serta perambahan di kawasan lindung. Tingkat partisipasi di desa-desa meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu, dan partisipasi ini dapat menjadi indikator awal bagi Efek Tata Kelola.

Studi lain menunjukkan **peningkatan tingkat partisipasi dalam lembaga tata kelola (Adhikari dkk. 2014) dapat mengarah pada penguatan capaian sosial-lingkungan (de Oliveira dkk. 2024).**

4.2 Efek Siklus Utang: Terdapat hubungan antara peningkatan mata pencaharian dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik

Efek Siklus Utang berasumsi akses terhadap layanan keuangan akan menurunkan ketergantungan pada pemberi pinjaman dengan suku bunga tinggi (Pomeroy dkk. 2020), yang pada gilirannya mendorong investasi pada praktik berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada praktik eksploitatif. Banyak PUMK yang didampingi YPI memilih menerapkan sistem tanpa bunga dan biaya administrasi tetap (Miller dkk. 2024b). Mayoritas pinjaman individu diambil untuk tujuan mata pencaharian di semua kategori gender, dengan pertanian sebagai alasan yang paling sering disebutkan. Sebagian besar pinjaman kelompok yang diambil dari PUMK bertujuan mendukung unit usaha yang sudah ada, alih-alih menciptakan aktivitas penghasil pendapatan baru. Masyarakat mengambil pinjaman untuk memperbaiki penghidupan mereka, dan pinjaman tanpa bunga memungkinkan mereka melakukannya tanpa terjebak dalam perjanjian utang seumur hidup (Pomeroy dkk. 2020). Sebagaimana dicatat Segovia-Vargas dkk. (2023), hal ini menurunkan risiko investasi pada metode usaha yang lebih berkelanjutan.

Sebagai perbandingan, rata-rata NPM di Amerika Serikat adalah 7,59% (Damoradan 2024). Secara umum, laba bersih 10% dianggap baik, dan 20% dianggap tinggi (Vipond 2018). Wilayah Landak dan Kubu Raya keduanya mencatatkan NPM tinggi, masing-masing sebesar 21% dan 20%. Bengkayang juga mencatatkan NPM yang baik sebesar 18%. Masyarakat mengambil pinjaman untuk berinvestasi pada usaha yang sudah ada demi memperbaiki penghidupan mereka, dan berdasarkan rata-rata NPM, mereka relatif sukses melakukannya. Hal ini juga terkonfirmasi dalam PIA, FGD mencatat aktivitas keuangan memiliki pengaruh sedang dalam memperbaiki mata pencaharian. Studi Novick dkk. (2023) di lokasi yang sama mengungkapkan perbaikan hasil panen petani berdampak pada penurunan pembalakan liar dan perbaikan pengelolaan pesisir, yang mengindikasikan hubungan antara perbaikan penghidupan dan peningkatan pengelolaan lingkungan memang terjadi di lapangan.



Rata-rata NPM (margin laba bersih):

21%
di Landak

20%
di Kubu Raya

18%
di Bengkayang

4.3 Efek Modal Manusia: Kesehatan dan pendidikan berperan sebagai penghubung antara inklusi keuangan dan konservasi

Efek Modal Manusia mengasumsikan akses terhadap layanan keuangan akan mendorong investasi lebih besar pada kesehatan dan pendidikan, yang menghasilkan peningkatan partisipasi dalam tata kelola dan pengelolaan ekosistem. Untuk menilai efek ini, perhatian harus diberikan pada peran pendidikan dan kesehatan sebagai mediator potensial antara inklusi keuangan dan kerja konservasi, mengingat keuangan masyarakat berfungsi sebagai alat mengatasi masalah-masalah tersebut (Mohammed dkk. 2018; Novick dkk. 2023; Pomeroy dkk. 2020; Segovia-Vargas dkk. 2023).

Pendidikan merupakan alasan kedua yang paling sering disebut anggota untuk mengambil pinjaman, yang mengindikasikan layanan keuangan kemungkinan besar berdampak pada pendidikan masyarakat. FGD mengidentifikasi aktivitas keuangan memiliki pengaruh rata-rata sedang terhadap capaian pendidikan. Berdasarkan informasi lapangan, banyak pengurus kelompok di Kubu Raya mencatat individu menggunakan pinjaman pendidikan untuk sekolah anak-anak mereka. Jika masyarakat berinvestasi lebih banyak pada pendidikan generasi mendatang, maka masyarakat kemungkinan akan memiliki tingkat literasi lebih tinggi, sehingga memudahkan masyarakat memahami substansi upaya konservasi (Bechtel 2010). Studi di Tanzania menemukan individu dengan pencapaian pendidikan lebih tinggi lebih cenderung mendukung status kawasan lindung (Kideghesho dkk. 2006). Studi di Brasil juga menunjukkan temuan serupa, tingkat pendidikan lebih tinggi dikaitkan dengan kesadaran lingkungan lebih besar (Philippsen dkk. 2017). Penelitian lebih lanjut mungkin akan membuktikan hal serupa di lokasi-lokasi kerja lembaga lingkungan ini.

FGD juga mengidentifikasi aktivitas keuangan memiliki dampak sedang dalam meningkatkan kesehatan dan layanan kesehatan, meski hanya sekitar 7% pinjaman yang diambil untuk tujuan kesehatan. Hal ini menunjukkan anggota mengambil pinjaman untuk kesehatan saat mereka membutuhkannya. Informasi kualitatif yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan banyak pengurus di Kubu Raya mengungkapkan dampak layanan keuangan terhadap kesehatan; selaras dengan temuan Banerjee dkk. (2022), dua perempuan menyebutkan bagaimana PUMK memungkinkan anggota memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat medis. Salah seorang dari mereka menyebutkan dampak ini sangat terasa saat ia melahirkan. Dalam FGD, hasil kesehatan dan lingkungan sering kali dibahas bersamaan, yang menunjukkan adanya kemungkinan koneksi antara kedua capaian tersebut. Hal ini mengindikasikan kesehatan merupakan mediator antara inklusi keuangan dan konservasi.

4.4 Efek Itikad Baik: Akses ke layanan keuangan dapat memperkuat persepsi positif dan kepercayaan

Jalur Efek Itikad Baik mengasumsikan akses ke layanan keuangan melalui PUMK akan meningkatkan persepsi positif dan kepercayaan terhadap YPI, sehingga meningkatkan partisipasi dalam aktivitas konservasi. Integrasi layanan keuangan di dalam PUMK dapat menjadi indikator kepercayaan kepada YPI, karena layanan keuangan PUMK dan lingkungan hanya disatukan di dalam PUMK setelah memperoleh persetujuan masyarakat secara formal. Namun, hal ini saja tidak cukup untuk menentukan keberadaan Efek Itikad Baik. Studi lain menemukan layanan keuangan sering kali menjadi salah satu motivator utama bergabung dan berpartisipasi dalam PUMK (Miller dkk. 2020). Mengingat konservasi berbasis masyarakat sering kali bergantung pada persepsi positif (Miller dkk. 2024c) dan kepercayaan (Kushardanto dkk. 2022; Auer dkk. 2020), hal ini menunjukkan layanan keuangan PUMK dapat menjadi alat yang layak untuk memperkuat itikad baik terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA). Sebagai contoh, Desa Dabong di Kubu Raya awalnya menolak model yang ditawarkan YPI. Namun seiring tumbuhnya kepercayaan melalui testimoni positif dari desa tetangga, para pemimpin lokal akhirnya meminta layanan tersebut. Layanan keuangan, bersama kepemimpinan yang efektif, terbukti sangat berdampak dalam membangun kepercayaan dan penerimaan di antara anggota masyarakat. Kushardanto dkk. (2022) menemukan kepercayaan terhadap kepemimpinan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan di Sulawesi.



— Pimpinan kelompok tabungan masyarakat melakukan pembukuan di Kubu Raya. Foto: Planet Indonesia



– Sirip hiu di lokasi pendaratan ikan. Foto: Planet Indonesia

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa inklusi keuangan berdampak signifikan pada berbagai capaian, termasuk memperbaiki tata kelola masyarakat dan meningkatkan ketahanan finansial; program-program ini dapat meningkatkan pengelolaan lingkungan dengan cara meningkatkan partisipasi di dalam badan tata kelola yang dipimpin masyarakat.

Layanan keuangan PUMK dapat memutus siklus utang dengan memperkuat mata pencaharian dan menjadikannya lebih berkelanjutan. Layanan keuangan juga membantu memperbaiki aspek kesejahteraan lainnya, termasuk kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat memicu keterlibatan lebih besar dalam upaya konservasi. Hal ini menunjukkan layanan keuangan PUMK dapat menjadi instrumen strategis dan memiliki relevansi potensial bagi program konservasi berbasis masyarakat di seluruh dunia.

Identifikasi variabel mediator lain yang memengaruhi hubungan antara inklusi keuangan dan konservasi, beserta studi lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan ini bertahan di berbagai wilayah lainnya, perlu dikaji lebih lanjut. Studi ini menunjukkan manfaat bagi organisasi konservasi untuk mengintegrasikan aktivitas inklusi keuangan ke dalam program mereka guna menjawab isu-isu sosial-ekologis secara lebih luas. Integrasi layanan keuangan melalui PUMK terbukti tidak hanya memperbaiki hasil lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan berbagai capaian lainnya.



Daftar Pustaka

- Adhikari, S., T. Kingi, dan S. Ganesh (2014). Incentives for community participation in the governance and management of common property resources: the case of community forest management in Nepal. *Forest Policy and Economics* 44: 1-9.
- Anderson, Andrea A. (2017). *The Community Builder's Approach to Theory of Change: A Practical Guide to Theory Development*. New York, NY: The Aspen Institute Roundtable on Community Change.
- Armitage, D., R. de Loë, dan R. Plummer (2012). Environmental governance and its implications for conservation practice. *Conservation Letters* 5: 245-255.
- Auer, A., J. Von Below, L. Nahuelhual, dkk. (2020). The role of social capital and collective actions in natural capital conservation and management. *Environmental Science & Policy* 107: 168-178.
- Banerjee, R., A. A. Maruta, dan R. Donato (2022). Does higher financial inclusion lead to better health outcomes? Evidence from developing and transitional economies. *Economics of Transition and Institutional Change* 31: 363-401.
- Bechtel, Jamie D. (2010). *Gender, Poverty and the Conservation of Biodiversity: A Review of Issues and Opportunities*. Macarthur Foundation Conservation White Paper Series. [Daring]. Tersedia di: https://www.macfound.org/media/files/csd_gender_white_paper.pdf.
- Damodaran, Aswath (2024). *Margins by Sector (US)*. New York University Steinhart School of Business. [Daring]. Tersedia di: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html.
- De Oliveria, M., T. Morison, K. R. O'Brien, dan C. E. Lovelock (2024). Governance of coastal wetlands: Beyond the community conservation paradigm. *Ocean and Coastal Management* 255: 1-15.
- Hollar, Marcy Ellen (2011). *The Influence of Village Savings and Loans Groups on Environmental Conservation Efforts in Zanzibar*. Utrecht University, Faculty of Geoscience.
- Kideghesho, J. R., E. Røskoft, dan B. P. Kaltenborn (2006). Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. *Biodiversity and Conservation* 16: 2213-2230.
- Kushardanto, H., R. Jakub, W. Suherfian, dkk. (2022). Household finances and trust are key determinants of benefits from small-scale fisheries co-management. *Marine Policy* 145: 1-10.
- Li, A., L. Gao, S. Chen, dkk. (2021). Financial inclusion may limit sustainable development under economic globalization and climate change. *Environmental Research Letters* 16: 1-13.
- Massingham, E. J., K. A. Wilson, E. Meijaard, dkk. (2023). Public opinion on protecting iconic species depends on individual wellbeing: Perceptions about orangutan conservation in Indonesia and Malaysia. *Environmental Science & Policy* 150: 1-11.
- Mhlanga, D. dan S. H. Dunga (2020). Measuring Financial Inclusion and its Determinants Among the Smallholder Farmers in Zimbabwe: An Empirical Study. *Euroasia Journal of Business and Management*: 266-281.
- Miller, A., A. Davenport, S. Chen, dkk. (2020). Using a participatory impact assessment framework to evaluate a community-led mangrove and fisheries conservation approach in West Kalimantan, Indonesia. *People and Nature*: 1-14.
- Miller, A., P. Damatashia, dan N. Sagita (2024a). *Financial Inclusion as the 'Alternate' to the Alternative Livelihood Approach in Conservation*. Planet Indonesia. [Daring]. Tersedia di: <https://www.planetindonesia.org/news/2024/6/23/financial-inclusion-as-the-alternate-to-the-alternative-livelihood-approach-in-conservation>; diakses pada 02/08/2024.

- Miller, A., P. Damatashia, dan N. Sagita (2024b). *The Unbanked: From Debt Cycles to Financial Inclusion and Resilience*. Planet Indonesia. [Daring]. Tersedia di: <https://www.planetindonesia.org/news/2024/5/23/the-unbanked-from-debt-cycles-to-financial-inclusion-and-resilience>.
- Miller, A., A. Ahmad, R. Carmenta, dkk. (2024c). Understanding non-participation in local governance institutions in Indonesia. *Biological Conservation* 294: 1-13.
- Moeliono, M., M. A. K. Sahide, I. W. Bong, dan B. Dwisatrio (2023). Social Forestry in Indonesia: Fragmented Values, Progress, Contradictions, and Opportunities. Dalam: *Social Value, Climate Change and Environmental Stewardship: Insights from Theory and Practice* (eds. Nikolakis, W. dan R. Moura da Veiga). Hal. 117-138. Springer, Cham.
- Mohammed, E. Y. dan Z. B. Uruguchi (2018). *Financial Inclusion for Poverty Alleviation: Issues and Case Studies for Sustainable Development*. Routledge. New York, NY.
- Mozumder, M. M. H., P. Schneider, M. M. Islam, dkk. (2024). Bridging the gap: enhancing socio-ecological resilience by breaking the debt cycle among small-scale hilsa fishers in Bangladesh. *Maritime Studies* 23: 1-22.
- Novick, B., J. Crouch, A. Ahmad, dkk. (2023). Understanding the interactions between human well-being and environmental outcomes through a community-led integrated landscape initiative in Indonesia. *Environmental Development* 45: 1-12.
- Novriyanto, J. T. Wibowo, W. Iskandar, dkk. (2012). Linking coastal community livelihoods to marine conservation in Aceh, Indonesia. *Oryx* 46: 508-515.
- Planet Indonesia (2022). *Strategic Plan*. Planet Indonesia. [Daring]. Tersedia di: <https://www.planetindonesia.org/news/2022/12/31/strategic-planning>.
- Planet Indonesia (2024). *2023 Annual Report*. Planet Indonesia. [Daring]. Tersedia di: <https://www.planetindonesia.org/news/2024/5/8/annual-report-2023>.
- Pomeroy, R., C. Arango, C. G. Lomboy, dan S. Box (2020). Financial inclusion to build economic resilience in small-scale fisheries. *Marine Policy* 118: 1-9.
- Segovia-Vargas, M. J., I. M. Miranda-García, dan F. A. Oquendo-Torres (2023). Sustainable finance: The role of savings and credit cooperatives in Ecuador. *Annals of Public and Cooperative Economics* 94: 951-980.
- Singleton, R. L., E. H. Allison, C. Gough, dkk. (2019). Conservation, contraception and controversy: Supporting human rights to enable sustainable fisheries in Madagascar. *Global Environmental Change* 59: 1-14.
- Sirtaine, S. dan H. Gonzalez (2023). *Why financial inclusion is so critical to climate resilience*. World Economic Forum. [Daring]. Tersedia di: <https://www.weforum.org/agenda/2023/09/why-financial-inclusion-is-so-critical-in-climate-resilience/>.
- Thalut, N., D. C. Fonchamnyo, dan M. C. Sama (2020). Financial Inclusion, Community Capacity Building and Pro-Wildlife Conservation Behavior around the Northern Periphery of Dja Biosphere Reserve, Cameroon. *Journal of Socioeconomics and Development* 3: 47-62.
- Thung, P., A. Ahmad, R. Carmenta, dkk. (dalam persiapan). Community-centered conservation enables synergies across dimensions of human well-being: Evidence from participatory impact assessments. *People and Nature*.
- World Bank (2024). *Financial Inclusion*. The World Bank Group. [Daring]. Tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>; diakses pada 1 Juli 2024.
- United Nations General Assembly (UNGA) (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). [Daring]. Tersedia di: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- United Nations Capital Development Fund (UNCDF) (2017). *Inclusive Finance: Increasing Access to Financial Services*. [Daring]. Tersedia di: <https://www.uncdf.org/download/file/127/1882/fipabrochurepdf>.

Vipond, Tim (2018). *Profit Margin*. Corporate Financial Institute. [Daring]. Tersedia di: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/accounting/profit-margin/>.

Wang, Y., S. Fahad, L. Wei, dkk. (2022). Assessing the role of financial development and financial inclusion to enhance environmental sustainability: Do financial inclusion and eco-innovation promote sustainable development? *Frontiers in Environmental Science* 10: 1-16.

Wild, R., M. Egaru, M. Ellis-Jones, dkk. (2021). Using Inclusive Finance to Significantly Scale Climate Change Adaptation. *African Handbook of Climate Change Adaptation*: 1-26.



PLANET
INDONESIA

www.planetindonesia.org